

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 telah selesai penyusunannya.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang transparan dan akuntabel. Selain itu Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya "*good governance*", yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun setahun sekali setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Inpres No 7/1999, unit-unit eselon II ke atas diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pertimbangannya adalah karena unit-unit itu sudah layak memberikan akuntabilitas kepada Publik, oleh karena itu harus siap untuk menjawab setiap permasalahan yang terkait dengan tanggungjawabnya. Atas dasar hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Pasaman menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 ini merupakan Laporan Kinerja Tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas di masa datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2017
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN

ALIM BAZAR, S.Sos
NIP. 19690614 199009 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. URAIAN SINGKAT TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI	3
D. PROFIL INSTANSI.....	5
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016	15
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
B. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2016.....	28
IV. PENUTUP	29
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi	
Kantor Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol Kabupaten Pasaman	1
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	9
Tabel 2.2 Keterkaitan Antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran.....	11
Table 2.3 Arah Kebijakan dan Indikasi Program Prioritas 2016-2021	13
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan	
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016	16
Tabel 2.5 Perjanjian kinerja Tahunan	
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016.....	17
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja	19
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016	20
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sampai Tahun 2016	
Dengan Target Jangka Menengah	21
Tabel 3.4 Analisa Program/ Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan.....	26
Tabel 3.5 Realisasi Naggaran Tahun 2016	28

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman melalui Sekretaris Daerah. Agar dapat secara efektif melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mendukung transparansi maka unit kerja harus melaksanakan apa yang telah dimaklumkan dalam program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 60 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman dengan tugas membantu Bupati dalam menjalankan kewenangan otonomi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menjalankan visi dan misinya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman berdasarkan kepada :

**Tabel 1.1 Dasar Hukum Pembentukan Instansi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol Kabupaten Pasaman**

No	Jenis	Tentang
1	UU Nomor 12 Tahun 1956	Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
2	Uu Nomor 43 Tahun 1999	Perubahan UU Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
3	UU Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4	UU No 35 Thn 2009	Narkotika
5	UU Nomor 2 Tahun 2011	Partai Politik
6	UU Nomor 15 Tahun 2011	Penyelenggara Pemilihan Umum
7	UU Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
8	UU Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
9	UU Nomor 17 Tahun 2013	Organisasi Kemasyarakatan

No	Jenis	Tentang
10	UU Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
11	UU Nomor 17 Tahun 2014	MPR, DPR, DPD dan DPRD
12	PP Nomor 38 tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
13	PP Nomor 39 Tahun 2007	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
14	PP Nomor 8 Tahun 2008	Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
15	PP Nomor 18 Tahun 2013	Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Anggota
16	Permendagri No. 16 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelejen Daerah
17	Permendagri No. 39 Tahun 2011	Perubahan Atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Kemendagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL Ddalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
18	Permendagri No. 36 Tahun 2010	Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
19	Permendagri No. 49 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
20	Permendagri No. 50 Tahun 2010	Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
21	Permendagri No. 29 Tahun 2011	Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
22	Permendagri No. 38 Tahun 2011	Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah
23	Permendagri No. 57 Tahun 2011	Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi Dan DPRD Kab/Kota
24	Permendagri No. 61 Tahun 2011	Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah
25	Permendagri No. 64 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
26	Permendagri No. 1 Tahun 2012	Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan
27	Permendagri No. 33 Tahun 2012	Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda
28.	Permendagri No. 71 Tahun 2012	Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
29	Permendagri No. 20 Tahun 2013	Perubahan Kedua Atas Permendagri No 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Depdagri dan Pemda dengan Ormas dan LNL dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Permendagri No. 21 Tahun 2013	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
31	Permendagri No. 26 Tahun 2013	Perubahan Atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

No	Jenis	Tentang
32	Permendagri No. 7 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
34	Permendagri No. 28 Tahun 2014	Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah Di TMII
35	Permendagri No. 77 Tahun 2014	Perubahan Atas Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
36	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
37	Perpres Nomor 23 Tahun 2010	Badan Narkotika Nasional
38	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
39	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2032;
40	Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 216);
41	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008	Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3);
42	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011	tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);
43	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2011	Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 6).
44	Perda Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.
45	Perda Nomor 8 Tahun 2013	Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
46	Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011	Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman

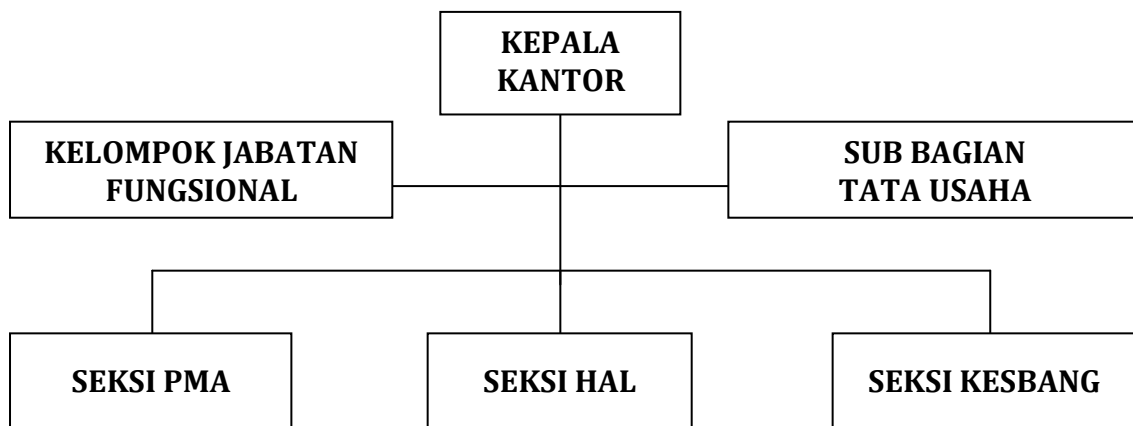
B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman, pasal 5 dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanganan Masalah Aktual;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Kesatuan Bangsa;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Kepala Seksi dengan jumlah pegawai keseluruhan 14 orang, yang terdiri dari 11 orang PNS dan 3 orang pegawai kontrak. Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana diagram berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasaman



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok : “ **membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik** ”. Tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman di pertegas dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor: 60 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman :

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa & politik;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. pemfasilitasian pemilihan bupati dan wakil bupati;
 - e. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan; ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian; sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada; serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - f. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di daerah;
 - h. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- i. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- j. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- l. koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- n. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat dibidang koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- o. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pemilu kada di daerah;
- p. penetapan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- q. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat di bidang bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- r. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- s. peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- t. pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di daerah;
- u. pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

D. PROFIL INSTANSI

1.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	NAMA KEPALA SKPD	ALIM BAZAR, S.Sos
3.	URUSAN PEMERINTAHAN (WAJIB/PILIHAN)	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4.	ALAMAT KANTOR	Jalan A.Yani No. 30 Lubuk Sikaping
5.	TELP. KANTOR	(0753) 20588
6.	ALAMAT RUMAH	JALAN ABDUL LATIEF NO. 2 LUBUK SIKAPING
7.	TELP RUMAH/ HP	081374 927735
8.	FAX	(0753) 20588
9.	E-MAIL	kesbangpolpasaman@gmail.com

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman beralamat di Jl. A. Yani Nomor 30 Lubuk Sikaping, Telp./ Fax (0753) 20588. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pasaman melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbang Linmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kantor Kesbangpol) dimana pada struktur organisasi kantor Kesbang Linmas tidak terdapat lagi seksi Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang digabung dengan struktur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Selain itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman juga melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fungsi Tim Komunitas Intelejensi Daerah (KOMINDA) dan Rakor MUSPIDA, dimana dalam pelaksanaanya ditunjang dalam Kegiatan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI.

Sesuai tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Dalam menetapkan Visi dan Misi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman mengacu pada pernyataan visi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, Visi Kabupaten Pasaman dan visi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah :

**"TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA
MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN "**

Sedangkan Misi Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Yaitu:

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit masyarakat.
2. Meningkatkan deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.
3. meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. memantapkan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.

2. TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN

Tujuan strategik pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mengetahui visi misinya untuk kurun waktu 1-5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik ini juga akan memungkinkan Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategik dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategik yang ditetapkan didalam mencapai tujuan strategiknya. Setiap tujuan strategik yang ditetapkan memiliki indikator (*performance indicator*) yang terukur. Adapun tujuan strategik dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan
3. Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.
5. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat

Adapun Sasaran yang hendak di capai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
2. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
3. meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis
4. meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.
5. meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat.

Adapun indikator sasaran yang hendak di capai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kenyamanan dalam beribadah
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT
3. Bertambahnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
4. Terciptanya pelayanan administrasi dalam hal pencairan dana bantuan Keuangan partai politik secara cepat
5. Meningkatnya keikut sertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Legislatif, Presiden, Kepala daerah)

7. Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.
9. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.

Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 tertuang dalam Tabel 2.1

Table 2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
2	Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	150 Orang	200 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang
3	Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	<p>a. Bertambahnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.</p> <p>b. terciptanya pelayanan administrasi dalam hal pencairan dana bantuan Keuangan partai politik secara cepat</p> <p>c. Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas</p> <p>d. Meningkatkannya partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Legislatif, Presiden, Kepala daerah)</p>	27 Org	27 Org	27 Org	27 Org	27 Org
				9 parpol	9 parpol	9 parpol	9 parpol	9 parpol
				20 Orang	25 Orang	25 Orang	30 Orang	30 Orang
				-	-	-	800 org	1000
4	Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.	meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	<p>1. meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>2. meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.</p>	62 kali	62 kali	62 kali	62 kali	62 kali
				3 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org	450 Org

Tabel 2.2
Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran

Visi : TERWUJUDNYA TATA SOSIAL POLITIK DAN BUDAYA MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
<p>Misi 1 : Meningkatkan kehidupan masyarakat kabupaten pasaman yang rukun dan bebas penyakit masyarakat</p>	<p>a. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Penguatan Kelembagaan Keagamaan</p>	<p>1. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT</p>
<p>Misi 2 : Meningkatkan deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.</p>	<p>Mewujudkan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang kondusif.</p>	<p>Meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.</p>
<p>Misi 3 : meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis</p>	<p>Mewujudkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis</p>	<p>meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis</p>
<p>Misi 4 : memantapkan pemahaman dan Pengamalan ideologi negara serta memantapkan wawasan kebangsaan dan kemampuan bela Negara.</p>	<p>Mewujudkan pemahaman dan pengamalan ideology Negara serta meningkatnya semangat cinta tanah air dan bela negara ditengah kelompok masyarakat</p>	<p>meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,</p>

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2016-2021.

Adapun strategi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun intern umat beragama.
2. Meningkatkan peran generasi muda dalam pemberantasan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.
3. Memantapkan semangat bela Negara
4. Meningkatkan upaya deteksi dini kerawanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.
5. Meningkatkan peran serta LSM/ Orsosmarsinal dalam pembangunan.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara.

Sementara kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

**ARAH KEBIJAKAN DAN INDIKASI PROGRAM PRIORITAS 2016-2021
MENGACU VISI DAN MISI BUPATI/ WAKIL BUPATI PASAMAN TERPILIH**

MISI 1 : 1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antar umat beragama	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bernuansa agama	%	50	100	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
	Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa akan bahaya narkoba;	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, dan pelaporan terhadap adanya penyalahgunaan narkoba.	Orang	170	850	Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		
Misi 5 : Menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	menciptakan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kali	62	310	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol

		Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah	Kali	4	20			
Misi 6 : Mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah serta membangun karakter masyarakat								
NO.	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM	URUSAN	SKPD
				KONDISI AWAL (2016)	KONDISI AKHIR (2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah kelompok masyarakat	meningkatnya pemahaman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air ditengah kelompok masyarakat,	Orang	450 Org	1800	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
4	meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	Orang	27	135	Program Pendidikan Politik Masyarakat	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Kesbangpol
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	parpol	9	45			
		Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	Paket	20 Orang	130 Orang			
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Orang	0	1800			

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik Tahun 2016-2021, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai Kwantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuhan keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2016.

Rencana Kinerja Tahunan 2016 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik – sebaiknya sebagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2016.

Tabel. 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali
Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	150 Orang
meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	- Meningkatkan pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi nya serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	27 Org
	- Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	9 parpol
	- Meningkatkan keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	20 Orang
meningkatkan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	- meningkatkan koordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	62 kali
	- meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	2 kali
meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Org
PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a.Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.	928.080.000
	b.Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah	67.810,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	39.340.000
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Fasilitasi pencegahan peredaran/ penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang	257.742.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyuluhan Pemantapan wawasan Kebangsaan	124.335.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal	162.370.000
TOTAL ANGGARAN	Rp. 1,579,677,000 ,-	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Penjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/kinerja. Merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 2.5
Penjanjian Kinerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali
Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	150 Orang
meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	- Meningkatkan pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksinya serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	27 Org
	- Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	9 parpol
	- Meningkatkan keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	20 Orang
meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	- meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	62 kali
	- meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	3 kali
meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Org

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a.Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.	928.080.000
	b.Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah	67.810,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	39.340.000
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Fasilitasi pencegahan peredaran/ penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang	257.742.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyuluhan Pemantapan wawasan Kebangsaan	124.335.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pemberdayaan Partai Politik,LSM dan Orsosmarsinal	162.370.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 1.572.507.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Proses pengukuran kinerja meliputi beberapa tahapan yaitu : penetapan indikator kinerja, penentuan target target yang harus dicapai dan proses pengumpulan dan pengesahan data kinerja. Proses pengukuran kinerja ini perlu dilakukan pada saat penyusunan dokumen rencana strategik dan rencana kinerja yaitu awal tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran. Setelah proses pengukuran kinerja dilaksanakan maka sebaiknya harus disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertanggung jawaban kinerja pengelola organisasi. Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan melakukan observasi dan masukan-masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tugas dan fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik. Proses penetapan indikator kinerja ini memang sebaiknya melibatkan seluruh unsur atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi baik internal maupun eksternal. pertimbangan ini sangat penting untuk diperhatikan disebabkan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi sebaiknya langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan akuntabilitas publik.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terlihat sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja
Kantor Kesbangpol Kab. Pasaman Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama				
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali	2 kali	100
SASARAN STRATEGIS 2 : Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)				
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/pemberantasan PEKAT	150 Orang	238 Orang	158.67

SASARAN STRATEGIS 3 : meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis				
1.	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksinya serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	27 Org	22 Orang	81.48
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	9 kali verivikasi parpol	9 kali verivikasi parpol	100
3.	Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	20 Orang	30 Orang	150
SASARAN STRATEGIS 4 : meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.				
1.	meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	62 kali	62 Kali	100
2.	meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	2 kali	2 kali	100
SASARAN STRATEGIS 5 : meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,				
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Orang	463 Orang	102.88

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Kantor Kesbangpol Kab. Pasaman Tahun 2015 dengan Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	2015	2016
1	2	3	4
Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	10 Kali	1 kali	2 Kali
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	850 Orang	600 Orang	238 Orang
Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	135 Orang	22 Orang	22 Orang
Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	45 kali verifikasi	9 Kali verifikasi	9 Kali verifikasi

INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	2015	2016
1	2	3	4
Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	230 Orang	26 Orang	30 Orang
Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	310 Kali	60 kali	62 Kali
meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	20 Kali	2 kali	2 kali
Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	1800 Orang	200 Orang	463 orang

3. Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis.

No.	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sesuai Renstra (s/d Tahun 2021)	Akumulasi Realisasi Kinerja s/d Tahun 2016	% capaian
1	2	3	4	5
1.	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	100 %	20 %	20 %
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	100 %	28 %	28 %
3.	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	100 %	16.29 %	16.29%
4.	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	100 %	20 %	20 %
5.	Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	100 %	23 %	23%
6.	meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	20 %	20%
7.	meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	100 %	20 %	20 %
8.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	100 %	25.7 %	25.7 %

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 8 Indikator yang ditetapkan pada tahun 2016, hanya 1 indikator kinerja yang tidak dapat dicapai sesuai target yang diharapkan. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dianggarkan dana sebesar Rp. 928,080,000,- realisasi sebesar Rp. 735,936,200- presentase realisasi anggaran sebesar 79.30 %, dan Kegiatan pemantauan, pelaporan dan Evaluasi perkembangan politik daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 67,810,000,- realisasi sebesar Rp. 40,912,000,- (60.33%). Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran, dimana acara/undangan dan acara-acara lainnya yang dianggap tidak mengganggu pencapaian kinerja ditanggihkan atau tidak diikuti seluruhnya. Target kinerja Kantor Kesbangpol pada kegiatan ini sudah tercapai dengan maksimal yaitu dengan memaksimalkan fungsi Forum Kominda, Muspida, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim pemantau, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan ini direncanakan untuk mendukung program kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan anggaran sebesar Rp. 39,340,000,- realisasi sebesar Rp. 0,- presentase realisasi anggaran sebesar 0 %. Kegiatan yang direncanakan sebanyak 2 kali, sudah terlaksana 2 kali. Hal ini disebabkan karena adanya efektifitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan serta adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena kegiatan dilaksanakan seiring dengan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Sehingga segala biaya langsung dibebankan pada kegiatan Kegiatan Penyiapan tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator kinerja yang ditargetkan pada kegiatan ini dapat dicapai seperti yang diharapkan. Pencapaian target yang telah ditetapkan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 124,335,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 81,223,400,- (65.33%), Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran, dimana acara/undangan dan acara-acara lainnya kalau dianggap tidak terlalu penting, ditanggguhkan atau tidak diikuti seluruhnya. Kegiatan diadakan di Gedung Kogusda Kab. Pasaman selama 3 (tiga) hari dengan mendatangkan nara sumber dari BNN provinsi, Kapolres Pasaman, dan Dandim 0305 Pasaman, yang diikuti oleh 463 orang peserta dari 510 orang yang ditargetkan. Yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Siswa SMA.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 257.742.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 231,094,450 Yaitu 89.66 %. Dengan adanya kegiatan ini akan menambah pengetahuan peserta tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kegiatan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Lembah Harau pada tanggal 2 s.d 4 April 2016. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Outbond dengan peserta yang berasal dari 4 (SMA N 1 Lubuk Sikaping, SMA N 2 Lubuk Sikaping, SMK N 1 Lubuk Sikaping dan SMK Kosgoro Lubuk Sikaping). Dengan jumlah peserta sebanyak 160 Orang.
- Nara sumber terdiri dari Ka. BNN Provinsi Sumatera Barat, Ka. BNNK kota Payakumbuh dan Tim Motivator dari Pemda Pasaman.
- Dalam rangka Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang di lingkungan sekolah telah dilantik Satgas Anti Narkoba Kabupaten Pasaman Periode 2016-2018 yang terdiri dari 81 orang guru SMP dan SMA sederajat yang ada di Kabupaten Pasaman. Anggota Satgas dilantik pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ka. BNN provinsi Sumatera Barat di gedung Kogda Lubuk Sikaping.

5. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator yang ditetapkan pada kegiatan ini dapat dicapai sesuai target. Untuk mendukung pencapaian indicator pada Program ini dimuat dalam Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal dianggarkan dana sebesar Rp. 162,370,000,- dengan realisasi sebesar Rp.105,845,150,- yaitu sekitar 65.19%,.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan operasional partai politik, LSM, dan Orsosmarsinal.

Pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pelatihan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal difokuskan bagi Kader Partai Politik (Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara). Kegiatan Dilaksanakan Selama 1 (satu) hari Kamis, 8 September 2016, bertempat di Flom Mitra Lubuk Sikaping, dengan nara sumber dari Badan Kesbangpol Provinsi dan Kepala Kantor Kesbangpol.
- Verifikasi pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang ada di DPRD kabupaten Pasaman periode 2014-2019 sebanyak 9 Partai.
- Fasilitas berupa Penggantian Transportasi dan Akomodasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Pasaman. Fasilitas telah diberikan kepada 13 LSM/Ormas dengan rincian :
 - a. Pemberian Uang saku, Penggantian biaya transportasi dan Akomodasi untuk 30 Orang anggota LSM/ Ormas.
 - b. Penggantian biaya makan minum bagi 3 LSM/ Ormas sebanyak 840 porsi

Untuk menanggulangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan mengenai informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra periode 2011-2016 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.
3. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP 2016 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2017.

5. Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Pasaman :

- a. Jumlah Pegawai : PNS (11)
- b. Tingkat Pendidikan
 - S1 = 8 orang
 - SLTA sebanyak = 1 orang
 - SLTP sebanyak = 2 orang
- c. Pangkat/Golongan
 - Pembina Tk. I, IV/b = 1 orang
 - Penata TK I, III/d = 3 orang
 - Penata Muda. III/a = 4 orang
 - Pengatur Tk. I, II/d = 1 orang
 - Pengatur, II/c = 1 orang
 - Pengatur Muda Tk. I, II/b = 1 orang
- d. dan Tenaga Kontrak (3 orang)

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum ini kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman terkendala dalam hal jumlah personil yang hanya sebanyak 14 orang. Kekurangan personil ini sangat mengganggu terutama saat diharuskan untuk terjun ke lapangan. Untuk itu diharapkan pada pemerintah daerah untuuk dapat menambah personil yang ada.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor kesbangpol di butuhkan SDM yang memadai, sarana dan prasarana organisasi yang mencukupi. Tahun 2016 ketersediaan SDM di Kantor Kesbangpol dirasakan masih belum mencukupi mengingat luas jangkauan tugas yang akan dilaksanakan.

6. Analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.4 Analisa Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

NO.	Program/ Kegiatan	Analisa
	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	
A	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
7	Kegiatan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terciptanya kondisi Kondusif di semua bidang yang dituangkan dalam rapat Muspida-Muspida Plus dan Rapat KOMINDA. Rapat Muspida diadakan sekali dalam sebulan, sementara pertemuan KOMINDA diadakan sekali dalam satu triwulan.
8	Kegiatan Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	Memantau situasi/ gejolak politik yang terjadi, terutama menjelang pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan langsung oleh Tim Monitoring dan Pelaporan Situasi Politik di Daerah Tahun 2016. Hasil pemantauan dilaporkan dalam pertemuan Tim yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 Triwulan.
B.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
9	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Kegiatan diadakan 2 kali : <ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 25 Mei 2016 di Ruang Rapat Kantor Buapti Pasaman lantai III dengan menghadirkan berbagai unsur seperti Tokoh Agama, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat Aktivistis, LSM/ Ormas, dengan tema Silaturahmi Pemerintah dengan lintas tokoh dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Pasaman - Pada tanggal 24 November 2016 berupa kegiatan apel Ke-Bhinnekaan Cinta Damai.
C.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
10	Kegiatan Penyuluhan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa cinta berbangsa dan bernegara masyarakat. Kegiatan diadakan di gedung Kogusda Lubuk Sikaping Kab. Pasaman selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21, 22 dan 23 November 2016, dengan mendatangkan nara sumber dari BNN Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol provinsi, Polres Pasaman dan Kodim 0305 Pasaman, yang diikuti oleh 510 orang peserta, yang dibagi menjadi 4 Kategori yang terdiri dari Guru SMP/ SMA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Siswa SMA.

NO.	Program/ Kegiatan	Analisa
D.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	
11	Kegiatan Penyuluhan/Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya kegiatan ini akan menambah pengetahuan peserta tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. - Kegiatan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Lembah Harau pada tanggal 2 s.d 4 April 2016. - Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Outbond dengan peserta yang berasal dari 4 (SMA N 1 Lubuk Sikaping, SMA N 2 Lubuk Sikaping, SMK N 1 Lubuk Sikaping dan SMK Kosgoro Lubuk Sikaping). Dengan jumlah peserta sebanyak 160 Orang. - Nara sumber terdiri dari Ka. BNN Provinsi Sumatera Barat, Ka. BNNK kota Payakumbuh dan Tim Motivator dari Pemda Pasaman. - Dalam rangka Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang di lingkungan sekolah telah dilantik Satgas Anti Narkoba Kabupaten Pasaman Periode 2016-2018 yang terdiri dari 81 orang guru SMP dan SMA sederajat yang ada di Kabupaten Pasaman. Anggota Satgas dilantik pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ka. BNN provinsi Sumatera Barat di gedung Kogda Lubuk Sikaping.
E.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
12	Kegiatan Pemberdayaan Partai Politik. LSM dan Orsosmarsinal	<p>dalam kegiatan ini terdapat tiga indicator kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal terdiri difokuskan bagi Kader Partai Politik (Ketua, Wakil Ketua dan Bendahara). Kegiatan Dilaksanakan Selama 1 (satu) hari Kamis, 8 September 2016, bertempat di Flom Mitra Lubuk Sikaping, dengan nara sumber dari Badan Kesbanpol Provinsi dan Kepala Kantor Kesbangpol. - Verifikasi pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang ada di DPRD kabupaten Pasaman periode 2014-2019 sebanyak 9 Partai. - Fasilitasi berupa Penggantian Transportasi dan Akomodasi Bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Pasaman. Fasilitasi telah diberikan kepada 13 LSM/Ormas dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian Uang saku, Penggantian biaya transportasi dan Akomodasi untuk 30 Orang anggota LSM/ Ormas. b. Penggantian biaya makan minum bagi 3 LSM/ Ormas sebanyak 840 porsi

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Kantor Kesbangpol Kab. Pasaman Tahun 2016

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	368,469,500	278,440,341	75.57
	1 Kegiatan Administrasi perkantoran	163,920,000	122,762,791	74.89
	2 Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran	107,549,500	67,775,950	63.02
	3 Kegiatan Rapat Koordinasi	97,000,000	87,901,600	90.62
B.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	47,500,000	36,590,000	77.03
	4 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	47,500,000	36,590,000	77.03
C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	4,400,000	4,400,000	100
	5 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	4,400,000	4,400,000	100
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	7,938,600	79.39
	6 Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD	10,000,000	7,938,600	79.39
E.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	995,890,000	776,848,700	78.01
	7 Kegiatan Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	928,080,000	735,936,200	79.30
	8 Kegiatan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	67,810,000	40,912,500	60.33
E.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	39,340,000	0	0
	9 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	39,340,000	0	0
F.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	124,335,000	81,223,400	65.33
	10 Kegiatan Penyuluhan Pemantapan Wawasan Kebangsaan	124,335,000	81,223,400	65.33
G.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	257,742,000	231,094,450	89.66
	11 Kegiatan Penyuluhan/ pencegahan peredaran/ Penggunaan Narkoba dan Obat-obatan terlarang	257,742,000	231,094,450	89.66
H.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	162,370,000	105,845,150	65.19
	11 Kegiatan Pemberdayaan partai Politik. LSM dan Orsosmarsinal	162,370,000	105,845,150	65.19
JUMLAH		2,010,046,500	1,522,380,641	75.76

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab demi bab di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai akuntabilitas kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang telah dicapai.
2. Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
3. Secara umum adanya pencapaian kinerja yang baik disebabkan karena Komitmen yang kuat dari Kepala Kantor dan Unit-unit kerja di kantor Kesatuan Bangsa dan politik untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik yang ditetapkan dalam Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 guna ikut mewujudkan *Good Governance*

B. SARAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas di masa datang.

Untuk menanggulangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas dan relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan

- mengenai informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang tercantum dalam Renstra dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.
 3. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP 2016 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2017.

Lubuk Sikaping, Januari 2017
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN

ALIM BAZAR, S.Sos
NIP. 19690614 199009 1 001

LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali
Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	150 Orang
meningkatkan kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	- Meningkatkan pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	60 Org
	- Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	9 parpol
	- Meningkatkan keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	20 Orang
meningkatkan stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	- meningkatkan koordinasi lintas sektoral antara stakeholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	62 kali
	- meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	2 kali
meningkatkan pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Org
PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah	928.080.000 67.810,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	39.340.000
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Fasilitasi pencegahan peredaran/ penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang	257.742.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyuluhan Pemantapan wawasan Kebangsaan	124.335.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal	162.370.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 1,579,677,000 ,-

Lubuk Sikaping, Januari 2016

**KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN**

ALIM BAZAR, S.Sos
NIP. 19690614 199009 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	2 kali
Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	150 Orang
meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	- Meningkatkan pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	60 Org
	- Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	9 parpol
	- Meningkatkan keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	20 Orang
meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	62 kali
	- meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	2 kali
meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	450 Org
PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah	928.080.000 67.810,000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	39.340.000
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Fasilitasi pencegahan peredaran/ penyalahgunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang	257.742.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penyuluhan Pemantapan wawasan Kebangsaan	124.335.000
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal	162.370.000
TOTAL ANGGARAN		Rp. 1,579,677,000 ,-

Lubuk Sikaping, Januari 2016

PIHAK KEDUA,**PIHAK PERTAMA,****H. SYOFYAN, SH**

ALIM BAZAR, S.Sos
NIP. 19690614 199009 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASAMAN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TSUMBER DATA
1	2	3
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama	Terciptanya kenyamanan dalam beribadah	Seksi PMA
Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan/ pemberantasan PEKAT	Seksi PMA
meningkatnya kehidupan politik masyarakat Kabupaten Pasaman yang stabil dan demokratis	- Meningkatkan pengetahuan pengurus parpol dan ormas tentang tupoksi masing-masing serta turut serta dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.	Seksi HAL
	- Meningkatkan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	Seksi HAL
	- Meningkatkan keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	Seksi HAL
meningkatnya stabilitas kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan.	- meningkatnyakordinasi lintas sektoral antara stakeholder terkait dengan membentuk tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Seksi Kesbang
	- meningkatnya pemantauan, pelapor dan Evaluasi perkembangan politik daerah.	Seksi Kesbang
meningkatnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta semangat bela Negara dan cinta tanah air di tengah kelompok masyarakat,	- Meningkatnya pemahaman dan pengamalan Pancasila, wawasan kebangsaan, semangat cinta tanah dan bela Negara.	Seksi Kesbang

Lubuk Sikaping, Januari 2016
**KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN,**

ALIM BAZAR, S.Sos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690614 199009 1 001

**Tabel 5.1 Program Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasaman 2016-2021**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Administrasi perkantoran b. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran c. Kegiatan Rapat Koordinasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.	Kegiatan Penyusunan Laporan SKPD
8.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan. b. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan Politik di Daerah
9.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
10.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Penyuluhan Pemantapan wawasan Kebangsaan
11.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
	Fasilitasi pencegahan peredaran/ penggunaan narkoba dan obat- obatan Terlarang
12.	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	a. Pemberdayaan Partai Politik, LSM dan Orsosmarsinal
	b. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum

Tabel 5.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN PASAMAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	SATU-AN	KONDISI KINERJA AWAL 2015	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke...														Unit kerja skpd penanggung jawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
					Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	
					18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.19.01	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat																		
1.19.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran (Persentase pelayanan administrasi perkantoran)	%	100	100	368,469	100	453,217	100	522,151	100	587,420	100	613,560	100	640,864	100	3,185,681	kesbangpol
1.19.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas gedung perkantoran dan operasional Kesbangpol	%	100	100	47,250	100	58,118	100	66,957	100	75,327	100	78,679	100	82,180	100	408,510	kesbangpol
1.19.01.03	Program Peningkatam Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparaturn dalam berpakaian dinas	%	100	100	4,400	100	5,412	100	6,235	100	7,015	100	7,327	100	7,653	100	38,041	kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	SATU-AN	KONDISI KINERJA AWAL 2015	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke...														Unit kerja skpd penanggung jawab		
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)				
					Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)		Tar-get	Rp. (000)
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
1.19.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	%	100	100	10,000	100	12,300	100	14,171	100	15,942	100	16,652	100	17,393	100	38,041	kesbangpol		
1.19.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	persentase peningkatan koordinasi antara pemuka agama dengan pemerintah dalam hal penanganan konflik yang bernuansa agama	%	50	60	39.340	70	48.388	80	55.748	85	63,769	90	65.507	95	68.423	95	86,457	kesbangpol		
1.19.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan, dan pelaporan terhadap adanya penyalahgunaan narkoba.	%	60	65	257.742	70	317.023	75	365.242	80	410.897	85	410.897	100	448.281	100	340,123	kesbangpol		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	SATU -AN	KONDIS I KINERJA AWAL 2015	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke...														Unit kerja skpd penanggung gjawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
					Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.19.01.1 5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya kordinasi lintas sektoral antara stekholder terkait dalam hal keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	70	75	1,062,890	80	1,307,355	85	1,506,203	90	1,694,479	90	1,769,883	95	1,848,643	95	9,189,453	kesbangpol
		Meningkatnya persamaan persepsi antara instansi terkait dalam hal penanganan gangguan stabilitas politik di daerah	%	70	75		80		85		90		90		95		95		kesbangpol
1.19.01.1 8	Program Kemitraan Pengembangan Kawasan Kebangsaan	Meningkatnya elemen masyarakat yang memahami 4 pilar kebangsaan	%	60	70	124,335	75	152,932	80	176,193	85	198,217	90	207,038	95	216,251	95	1,074,966	kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	SATU-AN	KONDISI KINERJA AWAL 2015	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke...														Unit kerja skpd penanggung jawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
					Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	
					Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.19.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan pengurus parpol tentang tupoksi serta turut serta dalam memberikan pendidikan politi kepada masyarakat.	%	0	45	162,370	55	199,715	60	230,092	75	508,853	75	831,497	85	868,499	85	1,074,966	kesbangpol
		Meningkatnya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran dalam hal pemberian rekomendasi pencairan dana bantuan Keuangan partai politik	%	100	100		100		100	-	100		100		100		100	2,801,026	kesbangpol
		Meningkatnya keikutsertaan para pengurus LSM/ Ormas dalam acara peningkatan kualitas SDM LSM/ Ormas	%	30	50		65		70	-	75		75		85		85		kesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	SATU -AN	KONDIS I KINERJA AWAL 2015	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke...														Unit kerja skpd penanggung jawab
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 2021)		
					Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	Tar-get	Rp. (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	%		-	-	-	-	-	-	85		-		100		100		kesbangpol

Lubuk Sikaping, Januari 2016

**KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN PASAMAN,**

ALIM BAZAR, S.Sos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690614 199009 1 001